BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara , yang pada prinsipnya menyelenggrakan jasa telekomunikasi di Indonesia, memberikan sambungan layanan lokal, sambungan langsung jarak jauh. PT. Telekomunikasi Tbk didirikan untuk suatu jangka waktu yang tidak terbatas. Tujuan dan objektifitas perusahaan adalah untuk mengoperasikan jaringan telekomunikasi dan menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan layanan informasi.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut TELKOM atau perseroan, merupakan peusahaan informasi dan komunikasi (*InfoCom*) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (*full service and network provider*) yang terbesardi Indonesia.

TELKOM menyediakan jasa telepon tetap kabel (*fixed wire line*), jasa telepon tetap nirkabel (*fixed wireless*), jasa telepon bergerak (*mobile sevice*), data dan internet serta jasa multimedia lainnya, dan network & interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.

Sebagai BUMN, Pemrintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang menguasai sebagian besar saham biasa perusahaan sedangkan sisanya dimiliki oleh publik.

TELKOM mencatatkan sahamnya di bursa efek dalam dan luar negeri yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), *New York Stock Exchange* (NYSE), *London Stock Exchange* (LSE), dan *Tokyo Stock Exchange* (TSE).

Untuk menjawab tantangan yang terus berkembaang di industri telekomunikasi dalam negeri maupun tingkat global TELKOM bertekad melakukan transformasi secara fundamental dan mnyeluruh di seluruh ini bisnis. Yang mencakup transformasi bisnis dan portofolio, transformasi infrastruktur dan sistem, transformasi organisasi dan sumber daya manusia serta transformasi budaya. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya diversifikasi bisnis TELKOM dari ketergantungan pada portofolio bisnis *Legacy* yang terkait dengan telekomunikasi, yakni layanan telepon tidak bergerak (*Fixed*), layanan telepon seluler (*Mobile*), dan Multimedia (FMM), menjadi portofolio TIME. Konsistensi TELKOM dalam berinovasi telah berhasil memposisikan perusahaan sebagai salah satu perusahaan yang berdaya saing tinggi dan unggul dalam bisnis *New Wave*.

Komitmen TELKOM untuk mendukung mobilitas dan konektivitas tanpa batas diyakini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan ritel maupun korporasi terhadap kualitas, kecepatan, dan kehandalan layanan serta produk yang TELKOM tawarkan. Hal itu terbukti dengan kontinuitas peningkatan di sisi jumlah pelanggan TELKOM, yakni mencapai 120,5 juta pelanggan per 31 Desember 2010, atau meningkat sebesar 14,6%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,3 juta pelanggan merupakan pelanggan telepon kabel tidak bergerak, 18,2 juta

pelanggan telepon nirkabel tidak bergerak, dan 94,0 juta pelanggan telepon seluler.

Adapun yang menjadi visi, misi dan tujuan dari PT. Telekomuniksi Indonesia adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan *Telecommunication*, *Information*, *Media* dan *Edutainment* (TIME) di kawasan regional.

Misi

1. Menyediakan layanan TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

Tujuan

Menciptakan posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis *legacy* & meningkatkan bisnis *new wave* untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. TELKOM, Tbk pada awanya merupakan suatu badan usaha bersama penyedia layanan pos dan telegraf yang bernama *Post-en Telegraafdients* yang didirikan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Gubernur Jendral Hindia Belanda berdasarkan keputusan *Staatsblad* No. 52 tanggal 25 Maret 1884, dan diumumkan dalam berita negara Hindia Belanda pada tanggal 3 April 1884.

Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspedisi surat menyurat untuk domestik dan jasa layanan telegraf internasional. Jasa telepon mulai ada di Indonesia pada tahun 1882 saapi 1906. Bentuk perusahaannya adaah swasta, teapi telah mendapatan izin dari pemerintah selama 25 tahun. Pada tahun 1906 pemerintah Kolonial Belanda membentuk departemen untuk menguasai kegiatan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia.

Pada tahun 1961 jasa pos dan telekomunikasi baru berdiri dengn nama Perusahaan Pemerintah Belanda, untuk menjaga jasa pos dan telekomunikasi di wilayah Sumatera, dan pada tahun 1970 jasa pos dan telekomunikasi diresmikan secara nasional. Pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi pada tahun 1965 ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu perusahaan negara pos dan giro, dan perusahaan negara telekomunikasi. Kemudian padatahun 1974 menjadi perusahaan negara yang terbagi menjadi dua perusahaan milik negara, yaitu perusahaan umum telekomunikasi (Perumtel) dan PT. Inti untuk meningkatkan jasa telekomunikasi dalam dan luar negeri, juga pembuatan peralatan telekomunikasi pada khususnya.

Pada tahun 1980, telekomunikasi internasional di pindahkan dari Perumtel ke Indosat. Pada tahun 1991, pemerintah meraskan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangun sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelanggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih yang lebih profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan benuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerinta No. 25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (PERUM)

dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itu berdiriah Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM.

Perkembangan selanjutnya, PT. TELKOM Tbk melakukan penawaran umum perdana sahamnya (Initial Public Offering/IPO) yang dilakukan tanggal 14 November 1995. Sejak itu saham PT. TELKOM, Tbk tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), *New York Stock Exchange* (NYSE), dan *London Stock Exchange* (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (*Public Offering Without Listing*/PWOL) di *Tokyo Stock Exchange*.

Perubahan di lingkungan PT. TELKOM, Tbk juga terus berlangsung, seperti peubahan bentuk perusahaan seperti sejak dari jawatan, Perum, Persero lalu kemudian menjadi perusahaan publik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Perubahan besar-besaran yang terjadi pada TELKOM terjadi pada tahun 1995 yang meliputi Restrukturisasi Internal, Kerjasama Operasi (KSO), Initial Public Offering (IPO).

Penerbitan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999, yang berlaku efektif pada bulan Sepetember 2000, PT TELKOM, Tbk telah memfalitasi masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha di industri telekomunikasi. Pada tahun 2002, PT. TELKOM, Tbk melepaskan kepemilikan sahamnya sebesar 12,7% di Telkomsel kepada *Singapore Telecom Mobile Pte Ltd ("Singtel Mobile").* Pada tahun 2004, PT Telkom meluncurkan layanan sambungan telepon langsung internasional tidak bergerak.

Tahun 2009 PT. TELKOM bertransformasi dari perusahaan *InfoComm* menjadi perusahaan penyelenggara TIME. Wajah baru TELKOM diperkenalkan kepada publik dengan menampilkan logo dan tagline baru perusahaan "*the world in your hand*". Dan pada tahun April 2010 PT. TELKOM, Tbk telah berhasil merampungkan proyek kabel bawah laut JaKaLaDeMa dan serat kabel optik yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar, dan Mataram.

Sejarah singkat PT. Telkom

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usah aswasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasai di konsolidasikan oleh pemerintah hindia belanda ke dalam jawatan post telegraaf telefoom(PTT). Pada tahun 1961, statrus jawatan diubah menjadi perushaan negara pos dan telekomunikasi (PN Postel), kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi perususahaan negara pos dan giro (PN Pos dan Giro) dan perusahaan negara telekomunikasi (PN telekomunikasi).

Pada tahun 1974, PN telekomunikasi diubah namanya menjadi perusahaan umum telekomunikasi (perumtel) yang menyelenggarkan jasa telekomukasi nasional maupun intyernasional, keberadaan perumtel dikukuhkan dengan adanya peraturan pemerintah no. 36 tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam dan luar negeri. Pada tahun 1980, seluruh saham pt. Indonesia satelite corporation tbk. (indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk persero. Persyaratan modal negara republik indonesia dalam saham pt. Indosat tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah no. 52 tahun 1980

Selanjutnya agar dapat lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, maka dengan peraturan pemerintah no. 22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan perumtel sebagai badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri dan pt. Indosat sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelengarakan telekomunikasi untuk umum internasioanl. Pada tahun 1989, ditetapkan undang-undang nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi

4.1.2 *Job description*

PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung memiliki struktur organisasi dimana dijelaskan secara garis besar pada bagian keuangan, diantaranya :

1. Dewan komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab dalam pengawasan kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh direksi dalam pengelolaan perseroan, dan memberikan masukan pada direksi pada hal-hal yang berhubungan dalam perkembangan perseroan, anggaran tahunan dan rencana bisnis, sertra anggaran dasar perseroan. Dewan komisaris juga menyetujui laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan yang disiapkan oleh direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris dibantu oleh sejumlah komite yang tugas dan tanggung jawabnya diuraikan dibawah ini:

a. Komite audit

Komite audit beranggotakan tujuh orang, terdiri dari dua komisaris independen, komisaris, dan empat orang anggota independen dari luar TELKOM. Komite audit diketuai oleh seorang komisaris independen

perseroan. Dua orang anggota memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi, serta pengendalian internal. Komite audit bekerja berdasarkan charter kmite audit yang ditetapkan dengan keputusan dewan komisaris yang antara lain berisi tujuan, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang komite audit. Komite ini mengkaji laporan keuangan sebelum dipublikasikan, memilih dan merekomendasikan kandidat untuk auditor independen (akuntan publik), mengawasi tugas akuntan publik. Memantau efektifitas pengendalian internal, dan menyelia kepatuhan perseroan sesuai peraturan dan perundangan, serta mengemban tugas-tugas khusus dari dewan komisaris. Sampai dengan akhir tahun 2006, anggota komite audit adalah:

Nama" komisaris

Seluruh anggota komite audit (kecuali arif, sartono dan gatot) adalah anggota independen dari luar telkom. Sahat pardede merupakan ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan. Secara garis besar charter berisi maksud, fungsi, dan tanggung jawab komite audit, dan secara khusus menerangkan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk:

1) Mengawasi proses pelaporan keuangan TELKOM dengan seijin dewan komisaris. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, komite audit memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai pemilihan auditor eksternal untuk disetujui pemegang saham
2) Melakukan pembahasan bersama dengan auditor internal dan eksternal mengenai cakupan dan rencana-rencana khusus untuk keiayan audit mereka

masing-masing. Selain itu juga membahas laporan keuangan konselidasi TELOKM, dan kecukupan perangkat pengendalian internal TELKOM.

3) Melakukan pertemuan rutin dengan auditor internal dan eksternal TELKOM tanpa dihadiri menajemen untuk membahas hasil pemeriksaan, evaluasi terhadap pengendalian internet perseroan dan kualitas laporan keuangan keseluruhan, dan
4) Menjalankan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dewan komisaris, khususnya yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi.

b. Komite nominasi dan remunerasi

Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari:

1) Namal”

Tugas komite nominasi dan remunerasi adalah:

1) Merumuskan kriteria seleksi dan prosedur nominasi untuk posisi-posisi strategis dalam perseroan berdasarkan prinsip-prinsip GCG;
2) Membantu dewan komisaris dan berkonsultasi dengan direksi dalam memilih kandidat untuk posisi strategis dalam perseroan, dan
3) Merumuskan sistem remunerasi untuk direksi berdasarkan kinerja dan prinsip kewajaran.

c. Komite pengkajian dan perencanaan (KPP)

komite ini dibentuk untuk mengakji rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi kepada direksi. Komite ini juga bertanggung jawab

dalam menyelia dan memantau pelaksanaan rencana kerja perusahaan. Sampai akhir tahun 2005, KPP terdiri dari sembilan anggota:

1) NAMA”

Seluruh anggota KPP (nama) adalah anggota independen dari luar TELKOM. Selama tahun 2005, KPP telah melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya menyelia pelaksanaan belanja modal (capital expediture) yang telah disetujui dalam anggaran tahunana; menyampaikan ususlan penyempurnaan kebijakan manajemen logistik; secara rutin mengevaluasi kinerja manajemen; melakuakn kajian atas: RJPP atau corporate strtegic scenario (CSS) untuk periode 2006-2010, investasi di anak-anak perusahaan, keuntungan dan kerugian melakuakn dual listing, dan secara komprehensif melakukan evaluasi rencana dan anggaran kerja perusahaan untuk tahun 2006.

2. Direksi

Direksi telkom bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan , strategi bisnis, dan pelaksanaannya dalam kerangka manajemen perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab dalam memadukan kebijakan dan sumber daya TELKOM untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan dan rencana kerja direksi. Sementara direktur lainnya bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, rencana pengembangan, pengawasan pelaksanaan dan administrasi sesuai lingkup kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi dibantu oleh sejumlah komite eksekutif yang tugas dan tanggung jawabnya diuraikan di bawah ini.

Sampai dengan akhir 2005, direksi terdiri dari tujuh direktur, yang terdiri dari direktur utama sebagai chief executive officer dan wakil direktur utama sebagai chief operating officer, serta lima direktur yang masing-masing bertanggung jawab untuk bidang network & solution, konsumer, enterprise & wholesale, keuangan, dan sumber daya manusia. Tiga direktorat yang pertama berada dalam koordinasi chief operating officer.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan direksi dibantu oleh sejumlah komite yang tugas dan tanggung jawabnya diuraikan di bawah ini:

a. Komite disclosure

   Komite disclosure (pengungkapan) terdiri dari 14 anggota senior dari berbagai unit yang diketahui oleh chief financial officer (CFO). Tugas komite ini adalah mendukung manajemen TELKOM dalam merancang dan mengevaluasi prosedur dan pengendalian disclosure dan ikut serta dalam proses disclosure. Sejak dibentuk 18 februari 2005, komite ini telah menyusun prosedur kerja internl yang berhubungan dengan pengkajian dan persiapan laporan tahunan telkom dalam form 20-f

   Pembentukan komite disclosure membakukan proses disclosure yang telah dirancang sebelumnya oleh sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertangging jawab untuk proses disclosure yang diperlukan.

b. Komite GCG

   Komite GCG terdiri dari tujuh anggota dan diketahui oleh direktur sumber daya manusia. Komite ini bertanggung jawab dalam memantau sanksi hukum dan administrasi yang dikeluarkan oleh TELKOM.

3. Rapat dewan komisaris dan direksi

Rapat dewan komisaris TELKOM harus diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam tiga bulan dan setiap saat:

a. Atas permintaan komisaris utama
b. Atas permintaan sepertiga anggota dewan komisaris
c. Atas permintaan tertulis dewan komisaris, atau
d. Atas permintaan seorang atau sekelompok pemegang saham TELKOM yang memiliki sedikitnya 10% dari saham TELKOM dengan hak suara yang sah.

Kuorum rapat dewan komisaris tercapai jika lebih dari stengah anggota dewan komisaris hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada komisaris lain. Keputusan rapat diambil secara diambil secara mufakat. Jika mufakat tidak terjadi, maka dilakukan pemungutan suara di antara anggota dewan komisaris yang hadir atau yang diwakilkan dalam rapat. Jika hasilnya imbang, maka keputusan yang akan diambil tersebut akan dipertimbangkan untuk ditolak. Rapat direksi dapat diselenggarakan sesuai keperluan atas permintaan :

a. Direktur Utama
b. Sedikitnya sepertiga anggota direksi
c. Direksi, atau
d. Permintaan tertulis dari pemegang saham atau sekelompok pemegang saham TELKOM yang memiliki sedikitnya 10% dari saham TELKOM dengan hak suara yang sah.

Kuorum rapat tercapai bila lebih dari setengah anggota direksi hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada direktur lain. Pada rapat direksi, setiap direktur memiliki satu hak suara dan satu hak suara tambahan dari direktur lain yang diwakilinya.

Keputusan rapat diambil secara mufakat. Jika mufakat gagal memperoleh keputusan maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota direksi yang hadir atau yang diwakilkan dalam rapat. Jika jumlah suaranya berimbang, maka keputusan akan ditentukan oleh ketua rapat.

4. Sekretaris perusahaan

Sekretaris perusahaan bertanggung jawab di antaranya untuk memastikan bahwa fungsi dewan komisaris dan direksi sejalan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; menghadiri seluruh rapat dewan komisaris dan direksi serta membuat notulensi; menyampaikan informasi-informasi material dan bertindak sebagai penghubung dengan otoritas pasar modal; melakukan koordinasi kegiatan hubungan investor; dan secara umum melakukan tugas-tugas kesekretariatan untuk dewan komisaris dan direksi.

5. Corporate compliance group

Corporate compliance group beranggotakan sejumlah staf senior dari unit yang bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan saran kepada direksi dalam hal yang berhubungan dengan aspek kepatuhan dan perlindungan hukum pada setiap kegiatan usaha TELKOM.

6. Corporate transformation group

Corporate tranformation group terdiri dari sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan saran kepada direksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses transformasi TELKOM menuju perusahaan jasa yang customer-centric.

7. Corporate planning group

Corporate planning group beranggotakan sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan saran kepada direksi berkaitan dengan perumusan rencana bisnis TELKOM baik jangka pendek maupun jangka panjang.

8. Unit sarbanes oxley act (SOA)

Selain unit-unit pendukung, direksi juga dibantu oleh unit SOA yang terdiri dari beberapa staf senior dari bidang keuangan, akuntansi, pengendalian internal, dan legal. Tanggung jawab utamanya adalah melakukan koordinasi agar antara rencana dan pelaksanaan kegiatan pengendalian internal TELKOM dapat berlangsung secara terpadu.

Unit audit internal merupakan bagian dari struktur pengendalian internal TELKOM yang bertangguing jawab untuk melakukan audit dan penilaian secara independen mengenai kehandalan dan efektifitas sistem dan mekanisme pengendalian internal TELKOM, serta membantu manajemen dan unit operasional untuk mencapai target mereka masing-masing,

Audit internal melakukan kajian terhadap ketepatan dan kebenaran informasi perseroan; kepatuhan pada kebijakan, rencana bisnis, prosedur kerja TELKOM, serta peraturan dan perundangan yang ada; pengendalian internal untuk menyelamatkan aset-aset perseroan; pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, dan pencapaian sasaran dan tujuan TELKOM. Perseroan telah membentuk forum, komunikasi auditor internal yang bekerja pada unit-unit yang berbeda untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan aktivitas audit TELKOM.

Sebagai perusahaan yang tercatat di New York Stock Exchange, TELKOM diantaranya harus mematuhi SOA section 404 mengenai pengendalian internal terhadapo pelaporan keuangan. Dengan bantuan dari konsultan manajemen ernst & young, TELKOM berhasil mengembangkan prosedur operasi standar untuk proses pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang telah diterapkan pada persiapan laporan keuangan TELKOM untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005. Karena luas kompleksnya proyek tersebut, TELKOM telah membentuk gugus tugas khusus yang ditugaskan untuk menangani proyek pengendalian internal terpadu TELKOM.

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Perputaran piutang

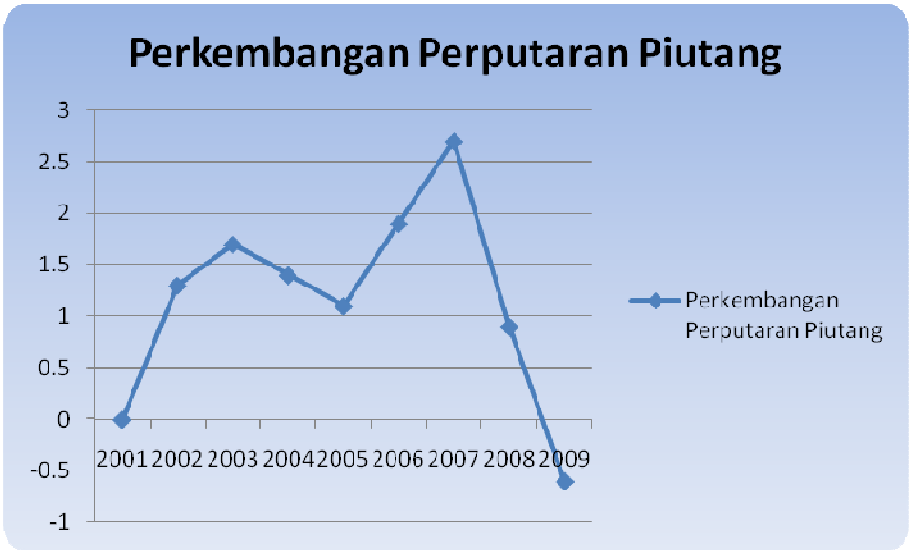
Berikut ini akan disajikan data mengenai Perputaran piutang pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung.

Tabel 4.1
Perputaran piutang (Rp Milyaran)

Tahun	Penjualan Bersih	Piutang Rata-rata	Perputaran Piutang	Perkembangan
	X1			
2001	16.283	2.444	6,6	0.0
2002	20.802	2.625	7,9	130.0%
2003	27.116	2.820	9,6	170.0%
2004	33.948	3.076	11	140.0%
2005	41.807	3.448	12.1	110.0%
2006	51.294	3.647	14	190.0%
2007	59.440	3.539	16.7	270.0%
2008	60.689	3.435	17,6	90.0%
2009	64.596	3.789	17,0	-60.0%
Total			**112.5**	**10**
Rata-Rata			**12**	**1**
Maximum			**17,6**	**3.2**
Minimum			**6,6**	**-0.2**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Perputaran piutang dari tahun 2001 - 2009 adalah sebesar 12, dimana nilai terendahnya dicapai pada tahun 2001 (sebesar 6,6), sedangkan nilai tertingginya dicapai pada tahun 2008, yaitu sebesar 17,2. Untuk lebih jelasnya, perkembangan Perputaran piutang pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung yang diteliti dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 4.1 Perputaran piutang



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perkembangan perputaran piutang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, dan perputaran piutang tertinggi dicapai pada tahun 2007 hal ini disebabkan oleh persaingan semakin ketat karena semakin banyak provider komunikasi yang semakin beragam.

4.2.2 Persediaan

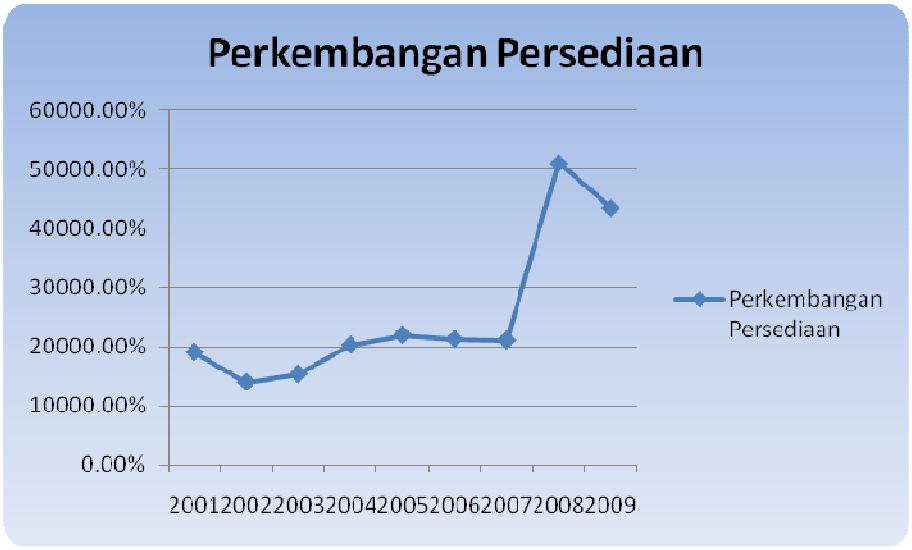
Berikut ini akan disajikan data mengenai Persediaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung.

Tabel 4.2
Persediaan (Rp Milyaran)

Tahun	Persediaan	Perkembangan
	X2	
2001	191	0.0
2002	140	-5100.0%
2003	154	1400.0%
2004	203	4900.0%
2005	220	1700.0%
2006	213	-700.0%
2007	211	-200.0%
2008	511	30000.0%
2009	435	-7600.0%
Total	**2,278**	**244**
Rata-Rata	**253**	**27**
Maximum	**511**	**300**
Minimum	**140**	**-76**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Persediaan dari tahun 2001 - 2009 adalah sebesar 253, dimana nilai terendahnya dicapai pada tahun 2002 (sebesar 140), sedangkan nilai tertingginya dicapai pada tahun 2008, yaitu sebesar 511. Untuk lebih jelasnya, perkembangan Persediaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung yang diteliti dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 4.2 Persediaan



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat persediaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, untuk persediaan tertinggi dicapai pada tahun 2008.

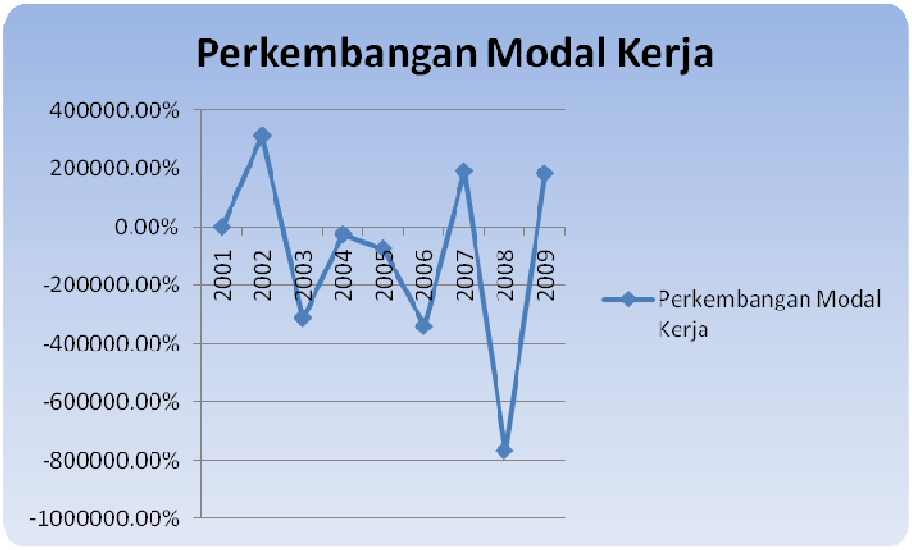
4.2.3 Perkembangan modal kerja

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Modal Kerja	Perkembangan
	Y			
2001	7.300	9.543	-2.243	0.0
2002	10.547	9.708	893	313600.0%
2003	8.942	11.170	-2.228	-312100.0%
2004	9.204	11.677	-2.473	-24500.0%
2005	10.305	13.513	-3,208	-73500.0%
2006	13.920	20.535	-6,615	-340700.0%
2007	15.978	20.674	-4,696	191900.0%
2008	14.622	26.998	-12,376	-768000.0%
2009	16.186	26.717	-10,531	184500.0%
Total			**-43,477**	**-8,288**
Rata-Rata			**-4,830.778**	**-920.889**
Maximum			**893**	**3,136**
Minimum			**-12,376**	**-7,680**

Berikut ini akan disajikan data mengenai Perkembangan modal kerja pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Perkembangan modal kerja dari tahun 2001 - 2009 adalah sebesar 66,244, dimana nilai terendahnya dicapai tahun 2008 (sebesar -12,376), sedangkan nilai tertingginya dicapai tahun 2002, yaitu sebesar 641. Untuk lebih jelasnya, perkembangan Perkembangan modal kerja pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung yang diteliti dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3 Perkembangan modal kerja



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perkembangan modal kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, untuk penurunan terbesar perkembangan modal kerja dicapai pada tahun 2008.

4.3 Perhitungan Statistik dan Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis penelitian, penulis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan analisis korelasi berganda. Metode ini dapat menjelaskan pengaruh *Perputaran piutang* dan *Persediaan* terhadap *Perkembangan Modal Kerja* pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk BANDUNG. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengolah data dan informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan statistik.

4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Analisis regresi linear berganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi linear berganda biasa disebut dengan uji asumsi klasik. Persyaratan awal untuk menggunakan regresi adalah variabel penelitian harus diukur paling rendah dalam bentuk interval atau rasio. Persyaratan lainnya berupa uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Jika terdapat multikolinearitas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu dan tingkat kesalahannya menjadi sangat besar. Dalam hal ini digunakan nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinearitas diantara variabel bebas. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF berada di bawah nilai 10 atau *tolerance value* lebih besar dar 0,1. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat nilai untuk masing-masing variabel bebas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance Value	VIF	Kesimpulan
1	*Perputaran piutang*	0,450	2,223	Tidak terjadi multikolinearitas
2	*Persediaan*	0,450	2,223	Tidak terjadi multikolinearitas

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai *tolerance value* kedua variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari

10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada data tersebut tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada prinsipnya adalah menguji apakah antar predictor (variable bebas) mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai residualnya. Jika nilai korelasi ini signifikan maka nilai residualnya tidak dapat diabaikan. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan korelasi *Rank Spearman* dari nilai residual dengan nilai variabel bebas. Jika nilai korelasi tidak signifikan berarti tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

Ho : Korelasi tidak signifikan (tidak terjadi heteroskedastisitas)

Ha : Korelasi signifikan (terjadi heteroskedastisitas)

$\alpha = 5\%$

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika p-value (sig) > 0,05

2. Tolak Ho jika p-value (sig) ≤ 0,05

Hasil pengujian heterokedastisitas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	rs	p-value (sig)	Keterangan	Kesimpulan
1	*Perputaran Piutang*	-0,433	0,244	Ho diterima	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
2	*Persediaan*	-0,500	0,170	Ho diterima	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Dari tabel diatas tampak bahwa p-value (sig) untuk kedua variabel bebas lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima. Artinya korelasi tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas pada variabel-variabel tersebut.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan angka Durbin-Watson hitung (DW) dengan nilai kritisnya (dL dan dU).

Kriteria pengambilan kesimpulan :

- Jika DW < dL atau DW > 4 – dL, maka terdapat autokorelasi.
- Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi.
- Jika dL ≤ DW ≤ dU atau 4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL, uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive).

Dengan ukuran sample n = 9, α = 0,05 dan banyaknya variabel independen k = 2, didapat nilai kritis dL = 0,408 dan dU =1,389.

Hasil pengujian autokorelasi disajikan pada tebel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	dL	dU	4-dU	4-dL	Kesimpulan
3,062	0,408	1,389	2,611	3,592	tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 3,062. Karena nilainya berada diantara 4 – dU ≤ DW (3,062) ≤ 4 – dL, maka dapat

disimpulkan bahwa pada data tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive).

d. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis statistik parametrik yaitu uji normalitas data. Apabila data pengamatan tidak berdistribusi normal maka analisis parametrik tidak bisa digunakan karena statistik dalam analisis parametrik diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas.

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

$\alpha = 5\%$

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika p-value (sig) > 0,05

3. Tolak Ho jika p-value (sig) ≤ 0,05

Tabel 4.7
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1074.723197
Most Extreme Differences	Absolute	.194
	Positive	.100
	Negative	-.194
Kolmogorov-Smirnov Z		.583
Asymp. Sig. (2-tailed)		.886

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa p-value (sig) bernilai 0,886. Karena nilai p-value (sig) > 0,05, maka Ho diterima. Artinya, data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, data tersebut memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian di atas, tidak diperoleh pelanggaran terhadap asumsi regresi klasik. Oleh karena telah memenuhi asumsi, maka analisis selanjutnya dapat dapat dilanjutkan.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh Perputaran piutang dan Persediaan terhadap Perkembangan Modal Kerja pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk BANDUNG, maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2}$$

Dimana :

Y = Perkembangan Modal Kerja

X_1 = Perputaran piutang

X_2 = Persediaan

a = Konstanta

$b_{1,} - b_3$ = Koefisien Regresi

Hasil pengolahan *software SPSS 13* untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Std, Error	t	Sig.
(Constant)	5297,462	1362,565	3,888	0,008
X_1	-360,059	157,249	-2,290	0,062
X_2	-22,613	5,072	-4,458	0,004

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 5297,462 - 360,059X_1 - 22,613X_2}$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 5297,462. Artinya, jika variabel *Perkembangan modal kerja* (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya (*Perputaran piutang dan Persediaan* bernilai nol), maka besarnya rata-rata nilai *Perkembangan modal kerja* akan bernilai 5297,462%.

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan *Perkembangan modal kerja*. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara *Perputaran piutang* (X_1) dengan *Perkembangan modal kerja* (Y). Koefisien regresi variabel X_1 sebesar -360,059 mengandung arti untuk setiap

pertambahan *Perputaran piutang* (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya *Perkembangan modal kerja* (Y) sebesar -360,059%.

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan *Perkembangan modal kerja*. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara *Persediaan* (X_2) dengan *Perkembangan modal kerja* (Y). Koefisien regresi variabel X_2 sebesar -22,613 mengandung arti untuk setiap pertambahan *Persediaan* (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya *Perkembangan modal kerja* (Y) sebesar -22,613 %.

4.3.3 Menguji Koefisien Regresi

- **Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji F.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari *Perputaran piutang dan Persediaan* secara simultan terhadap *Perkembangan modal kerja*.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari *Perputaran piutang dan Persediaan* secara simultan terhadap *Perkembangan modal kerja*.

α = 5%

Statistik Uji:

$$F = \frac{R^2(n - k - 1)}{k\,(1 - R^2)}$$

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika F hitung < F tabel

2. Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel

F tabel = $F_{\alpha\,;\,(df1,\,df2)}$; df1 = k , df2 = n-k-1

Hasil uji F berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

F hitung	df	F tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
44,742	df1 = 2 df2 = 6	7,260	0,000	Ho ditolak	Ada pengaruh (Signifikan)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 44,742. Karena nilai F hitung (44,742) > F tabel (7,260), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Perputaran piutang dan Persediaan* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Perkembangan modal kerja*.

- **Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t.

Hipotesis :

- Ho1 : $\beta_1 \neq 0$ Tidak ada pengaruh yang signifikan dari *Perputaran piutang* (X_1) secara parsial terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y).
- Ha1 : $\beta_1 = 0$ Ada pengaruh yang signifikan dari *Perputaran piutang* (X_1) secara parsial terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y).
- Ho2 : $\beta_2 \neq 0$ Tidak ada pengaruh yang signifikan dari *Persediaan* (X_2) secara parsial terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y).
- Ha2 : $\beta_2 = 0$ Ada pengaruh yang signifikan dari *Persediaan* (X_2) secara parsial terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y).

$\alpha = 5\%$

Statistik Uji :

$t_{hit} = \frac{b}{Se(b)}$, derajat bebas = n-k-1

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel

2. Tolak Ho jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

Hasil uji t berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	df	t tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X_1	-2,290	6	± 2,447	0,062	Ho diterima	Tidak Signifikan
X_2	-4,458		± 2,447	0,004	Ho ditolak	Signifikan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Untuk variabel *Perputaran piutang* (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar -2,290. Karena -t tabel (-2,447) < t hitung < t tabel (2,447) maka Ho

diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Perputaran piutang* (X_1) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Perkembangan modal kerja.*

2. Untuk variabel *Persediaan* (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar -4,458. Karena t hitung < -t tabel (-2,447) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Persediaan* (X_2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Perkembangan modal kerja.*

4.3.4 Analisis Korelasi Berganda

Untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara *Perputaran piutang dan Persediaan* dengan *Perkembangan modal kerja*, digunakan analisis korelasi berganda(R).

Tabel 4.11
Analisis Korelasi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square
1	.968[a]	.937

a. Predictors: (Constant), Persediaan, Perputaran Piutang

Berdasarkan hasil output *software SPSS* di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,968. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel *Perputaran piutang dan Persediaan* dengan *Perkembangan modal kerja*.

4.3.5 Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Analisis korelasi parsial berdasarkan hasil pengolahan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12

Besarnya Pengaruh Secara Parsial

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order	Besarnya Pengaruh Secara Parsial	Besarnya Pengaruh Secara Parsial (%)
X_1	-0,349	-0,854	0,298	29,8%
X_2	-0,680	-0,939	0,639	63,9%
Pengaruh Total			**0,937**	**93,7%**

Korelasi parsial diperoleh dengan mengalikan *standardized coefficient beta* dengan *zero-order*. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh *Perputaran piutang* (X_1) terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y) secara parsial adalah sebesar 29,8%. Sedangkan besarnya pengaruh *Persediaan* (X_2) terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y) secara parsial adalah sebesar 63,9%. Jadi, total keseluruhan pengaruh *Perputaran piutang* (X_1) dan *Persediaan* (X_2) terhadap *Perkembangan modal kerja* (Y) secara bersama-sama adalah sebesar 93,7%. Hal ini pun dapat terlihat dari nilai koefisien determinasinya.

4.3.6 Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh *Perputaran piutang dan Persediaan* terhadap *Perkembangan modal kerja* dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

KD = R^2 x 100%

= $(0,968)^2$ x 100%

= 93,7 %

Artinya, variabel *Perputaran piutang dan Persediaan* memberikan pengaruh sebesar 93,7% terhadap *Perkembangan modal kerja*. Sedangkan sisanya sebesar 6,3% *Perkembangan modal kerja* pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Bandung dapat diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulis.